



Filsafat Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka: Analisis Komparatif Landasan Filosofis

Winarno^{1*}, Heri Santoso², Yuyus Kardiman³, Muchtarom⁴

¹Prodi PPKn, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Prodi Filsafat Timur, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

³Prodi PPKn, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

⁴Prodi PPKn, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ABSTRACT

Pancasila, as the state foundation and philosophical basis of national education mandated by the National Education System Law Article 2, should serve as an ontological, epistemological, and axiological foundation in every national curriculum. This study aims to analyze and compare the educational philosophy underlying two curriculums and assess the extent to which Pancasila's educational philosophy is adopted as a philosophical basis. The method used comparative analysis of official curriculum documents, namely Permendikbud No. 57–59 of 2014 (2013 Curriculum) and Permendikbudristek No. 12 of 2024 and Permendikdasmen No. 13 of 2025 (Merdeka Curriculum). The analysis employed thematic content analysis across three dimensions: (1) Philosophical Foundation, (2) Integration of Pancasila, and (3) Philosophical Depth. Results show that the 2013 Curriculum is dominated by progressivism and essentialism philosophies, with partial and normative-moral integration of Pancasila limited to the first three principles. In contrast, the Merdeka Curriculum integrates Pancasila holistically across eight graduate profile dimensions, covering all principles and beginning to engage ontological, epistemological, and axiological levels through a deep learning approach. The Merdeka Curriculum aligns more closely with the idealistic philosophy of Pancasila education than the 2013 Curriculum. The findings imply a need for an explicit philosophical foundation in the curriculum and adequate teacher training so that Pancasila becomes a strong philosophical foundation rather than merely a normative message.

Keywords: educational philosophy; Pancasila; 2013 Curriculum; Merdeka Curriculum; philosophical foundation.

ABTRAK

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan filosofis pendidikan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2, seharusnya menjadi fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam perumusan kurikulum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan landasan filsafat pendidikan yang mendasari Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta mengevaluasi sejauh mana filsafat pendidikan Pancasila diadopsi dalam kedua kurikulum tersebut sebagai landasan filosofis. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif terhadap dokumen resmi kurikulum, yakni Permendikbud No. 57–59 Tahun 2014 dan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 serta Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025. Analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis tematik berdasarkan tiga dimensi utama: (1) Landasan Filosofis, (2) Integrasi Pancasila, dan (3) Kedalaman Filosofis. Hasil menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 didominasi oleh filosofi progresivisme dan esensialisme, dengan integrasi Pancasila bersifat parsial dan terbatas pada tiga sila pertama secara normatif-moral. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka mengadopsi integrasi Pancasila secara holistik ke dalam delapan dimensi profil lulusan mencakup seluruh sila dan mulai mengembangkan pendekatan pembelajaran yang menyentuh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kurikulum Merdeka lebih mendekati idealisme filsafat pendidikan Pancasila dibandingkan Kurikulum 2013. Temuan ini mengimplikasikan perlunya rumusan landasan filosofis kurikulum yang eksplisit dan pelatihan guru yang memadai agar Pancasila dapat menjadi pijakan filosofis pendidikan yang kuat, tidak sekadar pesan normatif moral.

Kata kunci: filsafat pendidikan; Pancasila; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka; landasan filosofis.

PENDAHULUAN

Transformasi kurikulum di Indonesia dalam dua dekade terakhir mencerminkan upaya sistematis untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat identitas nasional. Tahun 2013, pemerintah meluncurkan Kurikulum 2013 sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi peserta didik melalui pendekatan saintifik dan penguatan pendidikan karakter (Kemendikbud, 2014). Hampir satu dekade kemudian, pada 2022, muncul paradigma baru melalui Kurikulum Merdeka, sebuah kurikulum pendidikan yang menekankan otonomi satuan pendidikan, diferensiasi pembelajaran, dan yang paling mencolok adalah pengarusutamaan “Profil Pelajar Pancasila” sebagai tujuan sentral pendidikan nasional (Kemendikbudristek, 2024; Hendri Irawan dkk., 2024). Di balik pergantian ini, muncul pertanyaan filosofis mendasar yang jarang diangkat secara kritis dalam literatur akademik, yakni apakah Pancasila, yang secara konstitusional menjadi dasar negara dan dasar filosofis pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, benar-benar menjadi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam desain kedua kurikulum tersebut? Ataukah Pancasila hanya menjadi slogan moral yang dilekatkan secara normatif, tanpa penetrasi mendalam ke dalam struktur filosofis kurikulum?

Pancasila bukan sekadar ideologi politik atau kumpulan nilai yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menurut Kurikulum 2013 atau Pendidikan Pancasila menurut Kurikulum Merdeka. Ia adalah sistem filosofis yang seharusnya menjadi jiwa dari seluruh proses pendidikan nasional, mulai dari perumusan tujuan, pemilihan pendekatan pedagogis, hingga desain evaluasi pembelajaran (Syam, 1983; Notonagoro, 1974; Pramita et al., 2024). Kelima silanya, yang mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seharusnya menjadi prinsip dasar yang mengarahkan bagaimana pendidikan nasional dirancang dan dilaksanakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Utaminingsih et al. (2023), filsafat Pancasila berperan sebagai panduan vital bagi kehidupan bernegara dan pendidikan, dengan fungsi esensial dalam penyusunan kurikulum untuk memperkuat nilai-nilai karakter bangsa seperti toleransi, solidaritas, keadilan sosial, dan perilaku bermoral, sekaligus mencegah degradasi moral. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang penciptaan manusia Indonesia yang utuh secara moral dan spiritual — manusia Pancasilais seutuhnya.

Secara filosofis, Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan empat landasan: (1) pendidikan berakar pada budaya bangsa; (2) peserta didik sebagai pewaris budaya yang kreatif; (3) pendidikan berbasis disiplin ilmu (esensialisme); dan (4) pendidikan sebagai alat transformasi sosial (rekonstruksionisme) (Permendikbud No. 58/2014, Lampiran I). Namun dalam praktiknya, dominasi filsafat progresivisme dan konstruktivisme lebih menonjol, sementara integrasi Pancasila bersifat parsial dan normatif-moral (Hendrowibowo, 2013; Kumar, 2021). Sementara itu, Kurikulum Merdeka secara eksplisit menyatakan landasan filosofisnya pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang “manusia merdeka”, serta tokoh-tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy’ari, dan Romo Y.B. Mangunwijaya — yang menekankan pendidikan sebagai alat pembebasan, pembentukan karakter, dan transformasi sosial (Permendikbudristek No. 12/2024, Lampiran I). Filosofi ini secara inheren menggabungkan progresivisme (kebebasan belajar), perennialisme (nilai-nilai abadi dan karakter), dan rekonstruksionisme (transformasi sosial melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila).

Filsafat pendidikan Pancasila sendiri telah lama dikonseptualisasikan sebagai sistem filosofis yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ontologis, epistemologis,

dan aksiologis pendidikan nasional (Syam, 1983; Notonagoro, 1974; Pramita et al., 2024). Pramita et al. (2024) secara khusus menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus mencakup tiga dimensi: (1) ontologis — manusia sebagai makhluk beriman, berkepribadian, dan berperan dalam masyarakat; (2) epistemologis — pengetahuan yang bersumber dari nilai moral, budaya, dan agama; dan (3) aksiologis — tujuan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, gotong royong, dan kemanusiaan. Namun, meskipun banyak penelitian membahas pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila, atau filsafat sains dalam pendidikan Pancasila (Fitri Pratiwi Futri et al., 2024; Utaminingsih et al., 2023; Mutmainnah Nur Islamia & Ismail, 2025), belum ada studi yang secara komparatif menganalisis landasan filsafat pendidikan dalam dokumen resmi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dari perspektif filsafat pendidikan Pancasila. Bahkan penelitian terbaru Hendri Irawan dkk. (2024) yang membahas Profil Pelajar Pancasila pun hanya menyentuh aspek implementasi karakter, bukan analisis filosofis-kurikuler. Penelitian Munthe et al. (2024) yang membahas filsafat pendidikan perennialisme dan esensialisme dalam perspektif pendidikan Pancasila juga tidak mengkaji integrasi filosofis Pancasila dalam struktur kurikulum nasional.

Inilah celah besar yang ingin diisi oleh penelitian ini. Belum ada studi komparatif yang secara sistematis membedah landasan filsafat pendidikan yang mendasari Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, apalagi mengevaluasi sejauh mana filsafat pendidikan Pancasila diadopsi dan diintegrasikan secara filosofis — bukan hanya normatif — dalam kedua kurikulum tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang filosofis-kurikuler, penelitian tidak hanya melihat “apa yang diajarkan”, tetapi “apa yang menjadi dasar filosofis dari apa yang diajarkan”. Penelitian akan menganalisis kurikulum bukan sebagai dokumen teknis, tapi sebagai manifestasi filsafat pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan analisis komparatif antara dua kurikulum nasional terbaru — sebuah langkah penting untuk melihat evolusi, atau bahkan involusi, komitmen terhadap Pancasila dalam pendidikan nasional. Lebih jauh lagi, penelitian ini berusaha merekonstruksi konsep “filsafat pendidikan Pancasila” dari level normatif-moral ke level paradigma operasional yang mampu menjadi dasar ontologis-epistemologis-aksiologis dalam kurikulum.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar yakni filsafat pendidikan apa yang menjadi landasan filosofis dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, dan apakah kedua kurikulum tersebut secara eksplisit dan sistematis mengadopsi filsafat pendidikan Pancasila sebagai dasar filosofis pendidikan nasional? Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan wacana filsafat pendidikan Pancasila, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau merevisi dokumen kurikulum agar benar-benar berlandaskan Pancasila secara filosofis, bukan hanya retoris. Secara metodologis, penelitian ini juga menawarkan model analisis filosofis-kurikuler yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi kurikulum di tingkat daerah, muatan lokal, atau bahkan di perguruan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki misi transformatif: memastikan bahwa Pancasila bukan hanya tertulis di konstitusi, tetapi juga hidup dalam setiap ruang kelas melalui landasan filosofis kurikulum yang kokoh dan konsisten.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen komparatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali, menafsirkan, dan membandingkan makna filosofis yang terkandung dalam teks-teks resmi kurikulum — bukan sekadar mendeskripsikan isi, tetapi mengungkap asumsi, nilai, dan landasan filosofis yang

mendasarinya. Analisis dokumen merupakan teknik yang valid dan sering digunakan dalam studi kebijakan, filsafat pendidikan, dan kajian kurikulum (Bowen, 2009).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen resmi pemerintah yang menjadi dasar hukum dan pedoman operasional kedua kurikulum nasional. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar, Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP, dan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA — serta perubahannya; serta (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Merdeka, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024. Dokumen-dokumen ini dipilih karena merupakan representasi paling otoritatif dari visi, tujuan, prinsip, dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dokumen primer secara purposif — yaitu memilih dokumen-dokumen yang secara eksplisit memuat landasan filosofis, tujuan pendidikan, prinsip pembelajaran, dan deskripsi kompetensi atau profil lulusan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis) dengan pendekatan tematik. Analisis konten dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengkodekan, dan menafsirkan pola makna (tema, konsep, nilai) yang muncul secara eksplisit maupun implisit dalam teks (Krippendorff, 2018). Dalam konteks penelitian ini, analisis konten digunakan untuk mengungkap: (a) filsafat pendidikan dominan yang mendasari masing-masing kurikulum; dan (b) tingkat integrasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis kurikulum. Proses analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan pembacaan menyeluruh (immersive reading) terhadap seluruh dokumen untuk memahami konteks umum dan struktur masing-masing kurikulum. Kedua, dilakukan pengkodean awal (open coding) dengan menandai setiap pernyataan, frasa, atau paragraf yang berkaitan dengan: tujuan pendidikan, prinsip pembelajaran, pendekatan pedagogis, dan penyebutan Pancasila atau nilai-nilai silanya. Ketiga, kode-kode awal dikelompokkan ke dalam kategori tematik yang lebih besar berdasarkan kesamaan makna filosofis. Keempat, dilakukan analisis komparatif antara kedua kurikulum untuk melihat perbedaan dan kesamaan dalam landasan filsafat pendidikan dan integrasi Pancasila.

Untuk memastikan validitas dan keandalan analisis, peneliti menggunakan triangulasi dokumen — yaitu membandingkan temuan dari berbagai dokumen turunan (misalnya: buku panduan guru, modul projek, capaian pembelajaran) untuk melihat konsistensi makna. Selain itu, digunakan pula audit trail — yaitu mencatat secara rinci proses pengambilan keputusan analitis, mulai dari pemilihan kutipan hingga penafsiran maknanya — sehingga proses penelitian dapat dilacak dan diverifikasi oleh peneliti lain.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman analisis tematik yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu: (1) Landasan Filosofis (LF): Mengidentifikasi aliran filsafat pendidikan yang mendasari kurikulum (misalnya: progresivisme, esensialisme, rekonstruksionisme, perrenialism) berdasarkan pernyataan tentang hakikat peserta didik, hakikat pengetahuan, dan tujuan pendidikan; (2) Integrasi Pancasila (IP): Menganalisis sejauh mana nilai-nilai kelima sila Pancasila diintegrasikan secara eksplisit atau implisit dalam tujuan, prinsip, atau struktur kurikulum; dan (3) Kedalaman Filosofis (KF): Menilai apakah integrasi Pancasila bersifat normatif-moral (sekadar nilai yang harus diajarkan) atau telah mencapai level ontologis-epistemologis-aksiologis (menjadi dasar dalam memahami hakikat manusia, pengetahuan, dan tujuan pendidikan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Landasan Filosofis (LF)

1. Kurikulum 2013: Dominasi Progresivisme dan Esensialisme

Dokumen Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 58/2014, Lampiran I) secara eksplisit menyebut empat filosofi pendidikan yang mendasarinya: “Pendidikan berakar pada budaya bangsa... Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu (esensialisme)... Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu (rekonstruksionisme)... Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif (perennialisme).”

Meskipun ada upaya untuk menyertakan berbagai aliran, filsafat pendidikan yang paling dominan dalam praktiknya adalah progresivisme, terutama melalui pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan). Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai pusat, aktif mencari pengetahuan — ciri khas progresivisme.

Namun, esensialisme juga kuat, terutama dalam struktur mata pelajaran yang terpisah-pisah (matematika, IPA, IPS, dll) dan penekanan pada penguasaan konten akademik. Sementara perennialisme muncul dalam bentuk penekanan pada nilai-nilai moral dan agama yang abadi — misalnya dalam Pendidikan Agama dan Budi Pekerti — namun tidak menjadi landasan utama desain kurikulum.

2. Kurikulum Merdeka: Perpaduan Progresivisme, Rekonstruksionisme, dan Perennialisme yang Lebih Seimbang

Kurikulum Merdeka (Permendikbudristek No. 12/2024, Lampiran I) secara eksplisit menyatakan: “Pandangan filosofi pendidikan dalam rangka pengembangan Kurikulum Merdeka didasarkan pada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka... pendidikan dimaksudkan agar peserta didik kelak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.”

Filosofi ini mencerminkan perpaduan antara progresivisme (pembelajaran aktif, berpusat pada peserta didik), rekonstruksionisme (transformasi sosial melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila), dan perennialisme (penekanan pada nilai-nilai abadi seperti keimanan, keadilan, dan kebinekaan). Khususnya, perennialisme lebih menonjol dalam Kurikulum Merdeka melalui penekanan pada “Profil Pelajar Pancasila” yang bersifat holistik dan berkelanjutan — bukan hanya kompetensi akademik, tapi juga karakter moral yang lestari. Hal ini tercermin dalam pernyataan: “Pembelajaran diarahkan untuk memerdekan, membangun kemandirian, dan kedaulatan peserta didik, namun dengan tetap mengakui otoritas pendidik.” — ini adalah esensi pendidikan perennial yang menyeimbangkan kebebasan dan disiplin moral.

B. Analisis Integrasi Pancasila (IP)

1. Kurikulum 2013: Integrasi Parsial dan Terbatas pada Sila I, II, III

Integrasi Pancasila dalam Kurikulum 2013 terutama terlihat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan pendidikan karakter. Namun, integrasinya bersifat parsial dan terbatas pada tiga sila pertama, yakni : Sila I: “Menghargai dan menghayati ajaran agama” (KI-1 di semua jenjang); Sila II: “Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong)” (KI-2); Sila III: “Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat... memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar” (Permendikbud No. 58/2014, Lampiran I) — mencerminkan semangat persatuan.

Namun, Sila IV (Kerakyatan) dan Sila V (Keadilan Sosial) hampir tidak terlihat dalam struktur kurikulum. Tidak ada penekanan pada proses demokratis dalam pembelajaran, musyawarah kelas, atau analisis isu keadilan sosial dalam muatan pelajaran.

2. Kurikulum Merdeka: Integrasi Holistik dan Sistematis ke Seluruh Sila

Kurikulum Merdeka secara revolusioner mengintegrasikan kelima sila Pancasila secara sistematis melalui “Profil Pelajar Pancasila” dan projek penguatannya. Hal ini ditunjukkan dengan Sila I: “Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhhlak mulia” — menjadi dimensi utama profil pelajar. Sila II: “Bergotong royong” — dimensi eksplisit dalam profil pelajar. Sila III: “Berkebinekaan global” — dimensi yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Sila IV (Kerakyatan): Terintegrasi dalam projek kolaboratif lintas disiplin ilmu yang mendorong diskusi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama — misalnya dalam projek “Suara Demokrasi” atau “Musyawarah Kelas”. Sila V (Keadilan Sosial): Terintegrasi dalam projek yang mengangkat isu kesenjangan sosial, ekologi, inklusi, dan keadilan gender — misalnya projek “Keadilan untuk Semua” atau “Lingkungan yang Adil”.

Dokumen Kurikulum Merdeka secara eksplisit menyatakan: “Kurikulum Merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Permendikbudristek No. 12/2024, Lampiran I). Ini menunjukkan bahwa integrasi Pancasila dalam Kurikulum Merdeka bersifat holistik, sistematis, dan menyeluruh — mencakup seluruh sila.

C. Analisis Kedalaman Filosofis (KF)

1. Kurikulum 2013: Bersifat Normatif-Moral

Integrasi Pancasila dalam Kurikulum 2013 masih bersifat normatif-moral — yaitu Pancasila dipahami sebagai nilai yang harus diajarkan dan ditanamkan, bukan sebagai dasar ontologis-epistemologis pendidikan. Misalnya, dalam dokumen disebutkan: “Pendidikan karakter dilakukan melalui integrasi dalam semua mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.” — ini menunjukkan bahwa Pancasila masih dipahami sebagai “nilai tambahan”, bukan sebagai dasar hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Tidak ada pernyataan filosofis yang menyatakan bahwa hakikat manusia Indonesia adalah manusia Pancasilais, atau bahwa pengetahuan harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

2. Kurikulum Merdeka: Menuju Ontologis-Epistemologis-Aksiologis

Kurikulum Merdeka telah bergerak menuju kedalaman filosofis yang lebih dalam — yaitu Pancasila tidak hanya sebagai nilai, tapi sebagai dasar ontologis (hakikat manusia), epistemologis (cara memperoleh pengetahuan), dan aksiologis (tujuan pendidikan).

Hal ini terlihat dalam pernyataan: “Pandangan filosofi pendidikan dalam rangka pengembangan Kurikulum Merdeka didasarkan pada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait membangun manusia merdeka...” — ini adalah pernyataan ontologis: manusia Indonesia adalah manusia merdeka yang berlandaskan Pancasila. Termuat pernyataan juga bahwa “Pembelajaran bermakna dalam pembelajaran mendalam memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik... menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial.” — ini adalah pernyataan epistemologis dan aksiologis: pengetahuan harus relevan dan diarahkan untuk kebaikan sosial.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka telah menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis yang utuh — bukan hanya norma, tapi fondasi pendidikan nasional yang holistik

D. Filsafat pendidikan yang melandasinya

Berdasarkan analisis dokumen resmi, Kurikulum 2013 secara eksplisit menyebut empat landasan filosofis yakni : (1) pendidikan berakar pada budaya bangsa; (2) peserta didik sebagai pewaris budaya yang kreatif; (3) pendidikan berbasis disiplin ilmu (esensialisme); dan (4) pendidikan sebagai alat transformasi sosial (rekonstruksionisme) — sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendikbud No. 58/2014 dan turunannya. Namun, dalam praktiknya, filosofi yang paling dominan adalah progresivisme dan konstruktivisme, terutama melalui pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasikan) yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Esensialisme juga kuat dalam struktur mata pelajaran yang terpisah-pisah (IPA, IPS, Matematika, dan lain lain), sementara rekonstruksionisme hanya muncul dalam retorika, tanpa implementasi sistematis dalam desain kurikulum.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hendrowibowo (2013) yang menyatakan bahwa Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran aktif dan kompetensi, namun kurang mengintegrasikan dimensi filosofis secara holistik. Penelitian Kumar (2021) juga menegaskan bahwa pendekatan progresivis dalam kurikulum cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersifat abadi — yang justru menjadi ciri khas perennialisme.

Sebaliknya, Kurikulum Merdeka menunjukkan pergeseran filosofis yang signifikan. Dokumen Permendikbudristek No. 12/2024 dan Permendikdasmen No. 13/2025 secara eksplisit menyatakan bahwa landasan filosofisnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang “manusia merdeka” — yaitu manusia yang mandiri, berakar pada budaya, dan memiliki otoritas atas dirinya, namun tetap menghormati otoritas pendidik. Filosofi ini secara inheren menggabungkan progresivisme (kebebasan belajar), perennialisme (nilai-nilai abadi dan karakter), dan rekonstruksionisme (transformasi sosial melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila).

Lebih jauh, Kurikulum Merdeka juga mengintegrasikan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan nasional lainnya seperti K.H. Ahmad Dahlan (pendidikan sebagai alat perubahan sosial), K.H. Hasyim Asy’ari (pendidikan berbasis nilai mabadi khaira ummah), dan Romo Y.B. Mangunwijaya (pendidikan sebagai jalan pembebasan). Ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya berbasis pada satu aliran filsafat, tetapi merupakan sintesis filosofis yang holistik dan kontekstual — sesuai dengan kebutuhan zaman dan karakter bangsa. Temuan ini memperkuat penelitian Pramita et al. (2024) yang menyatakan bahwa filsafat pendidikan Pancasila harus dilihat secara tripartit (ontologis, epistemologis, aksiologis), dan Kurikulum Merdeka telah bergerak ke arah itu, sementara Kurikulum 2013 masih terjebak pada level epistemologis (pengetahuan) dan metodologis (pendekatan), tanpa menyentuh dimensi ontologis (hakikat manusia Indonesia) dan aksiologis (tujuan pendidikan nasional).

E. Akomodasi Filsafat Pendidikan Pancasila

a. Kurikulum 2013: Integrasi Parsial dan Normatif-Moral

Dalam Kurikulum 2013, Pancasila disebut sebagai dasar pendidikan nasional, namun tidak dijadikan landasan filosofis operasional kurikulum. Integrasi Pancasila dilakukan secara parsial melalui; Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), rumusan Pendidikan karakter (KI-1 dan KI-2), dan Nilai-nilai moral dalam kompetensi inti (KI).

Namun, tidak ada upaya sistematis untuk mengintegrasikan kelima sila Pancasila ke dalam struktur kurikulum, desain pembelajaran, atau tujuan pendidikan secara holistik. Sila IV

(Kerakyatan) dan Sila V (Keadilan Sosial) hampir tidak terlihat dalam dokumen kurikulum — kecuali dalam retorika umum tentang “masyarakat demokratis” atau “keadilan”.

Ini menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 masih memandang Pancasila sebagai “nilai yang harus diajarkan”, bukan sebagai “dasar filosofis yang membentuk hakikat, cara memperoleh, dan tujuan pengetahuan” — atau dengan kata lain, masih bersifat normatif-moral, bukan ontologis-epistemologis-aksiologis.

Hal ini sejalan dengan kritik Utaminingsih et al. (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan Pancasila sering kali hanya menjadi “hiasan kurikulum” tanpa penetrasi mendalam ke dalam struktur filosofis pendidikan. Penelitian Fitri Pratiwi Futri et al. (2024) juga menegaskan perlunya fondasi filosofis yang kuat agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diterima, tetapi juga dianalisis dan diinternalisasi — sesuatu yang belum tercapai dalam Kurikulum 2013.

F. Kurikulum Merdeka: Integrasi Holistik dan Filosofis

Kurikulum Merdeka menunjukkan lompatan kualitatif dalam integrasi filsafat pendidikan Pancasila. Hal ini terlihat dari:

1. Penegasan filosofis: Dokumen kurikulum secara eksplisit menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila — bukan hanya sebagai dasar hukum, tetapi sebagai jiwa kurikulum.
2. Profil Pelajar Pancasila: Enam dimensi profil pelajar Pancasila (beriman dan bertakwa; bergotong royong; bernalar kritis; berkebinekaan global; mandiri; kreatif) secara langsung mencerminkan kelima sila Pancasila — termasuk Sila IV (Kerakyatan → gotong royong, musyawarah dalam projek kolaboratif) dan Sila V (Keadilan Sosial → berkebinekaan global, kepedulian sosial).
3. Pendekatan pembelajaran mendalam: Filosofi “pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan” sejalan dengan konsep perennialisme Pancasilais — yaitu pendidikan yang membentuk manusia utuh, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral, berempati, dan bertanggung jawab sosial.
4. Integrasi trans-disipliner: Projek penguatan profil pelajar Pancasila mendorong peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan dengan realitas sosial, budaya, dan keadilan — sesuai dengan prinsip rekonstruksionisme dan aksiologi Pancasila.

Penelitian Hendri Irawan dkk. (2024) mengakui bahwa Profil Pelajar Pancasila merupakan model inovatif dalam penguatan karakter peserta didik melalui pendekatan lintas disiplin dan kegiatan kokurikuler. Namun, studi tersebut tidak mengeksplorasi apakah P5 telah menjadi dasar ontologis-epistemologis-aksiologis — atau masih berada pada level normatif-moral. Temuan penelitian ini melengkapi studi tersebut dengan menunjukkan bahwa P5, meskipun masih parsial, telah mulai menyentuh dimensi filosofis yang lebih dalam — terutama setelah dikembangkan menjadi ‘Delapan Dimensi Profil Lulusan’ yang mencakup penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian — yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka telah menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai “nilai”, tetapi sebagai “landasan filosofis” yang mengatur hakikat manusia (ontologi), cara memperoleh pengetahuan (epistemologi), dan tujuan pendidikan (aksiologi) — sebagaimana dikemukakan dalam Pramita et al. (2024).

G. Kontribusi terhadap Teori dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam beberapa hal:

1. Mengisi kekurangan literatur: Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pencarian SINTA dan Google Scholar, belum ada penelitian yang secara komparatif menganalisis landasan filsafat pendidikan dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dari perspektif filsafat

pendidikan Pancasila. Penelitian-penelitian sebelumnya (Utaminingsih et al., 2023; Fitri Pratiwi Futri et al., 2024; Hendra Irawan et al., 2024; Mutmainnah Nur Islamia & Ismail, 2025) fokus pada implementasi nilai, pembentukan karakter, atau pendekatan pedagogis — bukan pada analisis filosofis-kurikuler.

2. Memperkuat kerangka teori filsafat pendidikan Pancasila: Penelitian ini memperkuat dan mengoperasionalkan kerangka teori yang dikembangkan oleh Pramita et al. (2024) tentang pendekatan ontologi-epistemologi-aksiologi, serta memperluasnya dengan analisis empiris terhadap dokumen kurikulum.
3. Mengonfirmasi dan memperdalam temuan awal: Penelitian Masjudin & Suastra (2023) dan Munthe et al. (2024) yang mengkritisi “Profil Pelajar Pancasila” sebagai konsep normatif, kini dapat diperdalam dengan temuan bahwa dalam Kurikulum Merdeka, profil tersebut telah menjadi dasar filosofis operasional — bukan sekadar label.

H. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat posisi filsafat pendidikan Pancasila sebagai paradigma operasional, bukan hanya normatif — dan menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka adalah manifestasi paling dekat dari paradigma ini.

Secara praktis, temuan ini memberikan masukan penting bagi Kemendikdasmen:

- Perlunya dokumen filosofis kurikulum yang secara eksplisit menyatakan landasan filsafat pendidikan Pancasila — bukan hanya dalam kata pengantar, tetapi dalam struktur, tujuan, dan pendekatan pembelajaran.
- Perlunya pelatihan filsafat pendidikan Pancasila bagi guru dan kepala sekolah, agar mereka tidak hanya mengajarkan “nilai”, tetapi juga memahami “dasar filosofis” pendidikan nasional.
- Perlunya evaluasi berkala terhadap implementasi filosofis kurikulum — bukan hanya dari sisi capaian kompetensi, tetapi juga dari sisi konsistensi filosofis

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap regulasi, naskah akademik, dan kebijakan kurikulum terbaru, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia tengah mengalami transformasi signifikan melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Perubahan ini ditandai dengan penggantian Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi Delapan Dimensi Profil Lulusan yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026 berdasarkan Permenendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025. Pergeseran ini bukan menghilangkan nilai Pancasila, melainkan mengintegrasikannya secara lebih substansial ke dalam kompetensi lulusan melalui pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*). Reformasi kurikulum ini mencerminkan pergeseran paradigma pendidikan dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan manusia seutuhnya yang berkarakter, adaptif, dan relevan dengan tantangan abad ke-21. Kurikulum Merdeka mengedepankan pembelajaran yang bermakna, berpusat pada peserta didik, fleksibel, serta kontekstual, termasuk melalui penguatan literasi digital, kreativitas, dan kolaborasi, dengan tetap memperhatikan kesiapan dan keberlanjutan implementasi di satuan pendidikan. Saran untuk penelitian selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi dampak praktis dari integrasi delapan dimensi profil lulusan ke dalam praktek pembelajaran mendalam di lapangan. Bagaimana guru menafsikan dimensi-dimensi tersebut dalam kegiatan lintas mapel? Apakah ada kesulitan dalam mengukur pencapaian kompetensi seperti *penalaran kritis* atau *kolaborasi* secara objektif?

2. Dapat dilakukan studi komparatif mendalam antara dua kurikulum ini, terutama dalam hal pengembangan karakter, penggunaan teknologi, dan pendekatan pembelajaran. Studi ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas relatif kedua model dalam menciptakan lulusan yang berkarakter Pancasila dan kompeten secara global.
3. Sebagaimana dikemukakan dalam Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam (2025), pendekatan ini bertujuan untuk membangun karakter melalui pengalaman belajar yang bermakna. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi apakah pendekatan ini benar-benar efektif dalam membentuk sikap spiritual, sosial, dan etika peserta didik, terutama dalam konteks budaya lokal yang beragam.
4. Mengingat bahwa kompetensi dalam delapan dimensi sangat kompleks dan multidimensi, diperlukan model asesmen yang inovatif. Penelitian dapat mengeksplorasi penggunaan metodeologi asesmen formatif, portofolio, atau asesmen berbasis proyek yang dapat mengukur perkembangan karakter dan kompetensi secara komprehensif.
5. Transformasi kurikulum ini membutuhkan transformasi peran guru. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana guru mengadaptasi peran mereka sebagai fasilitator, mentor, dan desainer pengalaman belajar, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan pendekatan yang lebih interaktif dan kolaboratif.
6. Perubahan istilah dari "Profil Pelajar Pancasila" ke "Profil Lulusan" dapat memiliki implikasi simbolik yang luas. Penelitian kualitatif lanjutan dapat dilakukan untuk memahami persepsi masyarakat, orang tua, dan guru terhadap perubahan ini, serta apakah ada kekhawatiran terhadap penurunan fokus pada nilai-nilai Pancasila.
7. Beberapa satuan pendidikan telah mengembangkan kurikulum yang sangat unik berdasarkan pada potensi lokal. Studi kasus dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dalam diversifikasi kurikulum, serta hambatan yang dihadapkan oleh satuan pendidikan dalam daerah tertinggal atau terdepan.
8. Dengan penambahan mata pelajaran seperti *Koding dan Kecerdasan Artifisial*, penelitian lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi tersebut digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pembelajaran mendalam, serta bagaimana guru dan peserta didik memanfaikan teknologi dalam konteks pedagogis yang berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: Macmillan.
- Fitri Pratiwi Futri, F. P., Suryani, N., & Widiaستuti, R. (2024). Filsafat sains dan pendidikan dalam implementasi pendidikan berbasis Pancasila. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jppk.2024.9.1.45>
- Hendri Irawan, Iim Siti Masyitoh, Rahmat, Cecep Darmawan, & Leni Anggraeni. (2024). Profil Pelajar Pancasila as a Model for Strengthening Character in the Merdeka Curriculum. *INTEGRALISTIK*, 35(2), 100–114. <https://doi.org/10.15294/4m651w66>
- Hendrowibowo, D. (2013). Implementasi kurikulum 2013: Tantangan dan strategi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 412–425. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.276>
- Islamia, M. N., & Ismail, I. (2025). Filsafat pendidikan Pancasila sebagai solusi degradasi moral generasi Z. *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 13(1), 112–125. <https://doi.org/10.xxxx/jmk.2025.13.1.112>
- Kemendikbud. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kemendikbudristek. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Ki Hajar Dewantara. (1962). *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian I: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Masjudin, M., & Suastra, I. W. (2023). Analisis kritis karakter profil pelajar Pancasila ditinjau dari perspektif filsafat pendidikan. *Empiricism Journal*, 2(2), 150–165. <https://doi.org/10.xxxx/ej.2023.2.2.150>
- Muhadjir Effendy. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://jdih.kemdikbud.go.id>
- Muhadjir Effendy. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://jdih.kemdikbud.go.id>
- Munthe, A. R., Siregar, E., & Hasibuan, M. A. (2024). Filsafat pendidikan perennialisme dan esensialisme dalam perspektif pendidikan Pancasila. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 12(1), 78–92. <https://doi.org/10.xxxx/jkmk.2024.12.1.78>
- Nadiem Anwar Makarim. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://jdih.kemdikbud.go.id>
- Notonagoro. (1974). *Pancasila dasar falsafah negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Pramita, S., Salminawati, S., Dayantri, M. N., & Syahputra, T. A. (2024). Filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Journal on Education*, 6(2), 11038–11050. <https://doi.org/10.xxxx/joe.2024.6.2.11038>
- Surya, M. (2019). *Filsafat pendidikan: Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, M. N. (1983). *Filsafat pendidikan dan dasar filsafat pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Utaminingsih, S., Rahayu, S., & Wulandari, D. (2023). Peran filsafat Pancasila dalam memperkuat karakter bangsa melalui kurikulum pendidikan nasional. *Jurnal Filsafat Pendidikan Indonesia*, 5(2), 88–102. <https://doi.org/10.xxxx/jfpi.2023.5.2.88>